

Desukarnoisasi dalam Framing Pers Orde Baru Tahun 1966-1970

Laila Amalia Khaerani, Humaidi, Abrar

Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri
Jakarta

Email : lailaamalia480@gmail.com

Abstract: *This research aims to reconstruct the history of de-Sukarnoization at the beginning of the New Order regime from 1966 to 1970. The method used is the historical method by Kuntowijoyo which consists of 5 stages including topic selection, source gathering (heuristics), source criticism (verification), interpretation (interpretation), and writing (historiography). The deSukarnoization process which was framed by newspaper content in 1966 to 1970 was a process of delegitimizing Sukarno's role and name in the eyes of society. 1966 was the starting point for the legitimacy process of the New Order regime, so that his political opponents on the government stage had to be marginalized. Through daily newspaper reporting that has a similar pattern, it can succeed in making the reader reconstructed in this process.*

Keywords: *deSukarnoisasi, Framing Pers, New Order*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi sejarah mendeskarnoisasi pada awal masa rezim Orde Baru tahun 1966 sampai 1970. Metode yang digunakan melalui metode sejarah oleh Kuntowijoyo yang terdiri dari 5 tahap diantaranya pemilihan topik, pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber (verifikasi), interpretasi (penafsiran), dan penulisan (historiografi). Proses deSukarnoisasi yang terframing oleh konten koran harian pada tahun 1966 sampai 1970 merupakan salah satu proses mendelejitimasi peran dan nama Sukarno di mata masyarakat. Tahun 1966 menjadi titik awal adanya proses legitimasi rezim Orde Baru, sehingga lawan politiknya di panggung pemerintahan harus dimarginalkan. Melalui pemberitaan koran harian yang memiliki kemiripan dalam polanya, bisa berhasil membuat pembaca merekonstruksi dalam proses ini.

Kata Kunci : *deSukarnoisasi, Framing Pers, Orde Baru*

PENDAHULUAN

Mulainya Orde Baru menjadi penanda Presiden Soeharto mengukir kisahnya dalam sejarah Indonesia. Berdasarkan surat perintah 11 Maret 1966 yang berisi pemandatan Presiden Soeharto untuk melanjutkan pemerintahan Indonesia dalam merespon kasus 30 September 1965 (Nugroho.1984). Periode awal Orde Baru, lawan politik terbesar dari Presiden Soeharto ialah Presiden Soekarno. Sebagai presiden sebelumnya, nama Presiden Sukarno masih melekat kuat di dalam pikiran

masyarakat. Cara menyubordinasikan yang sangat jelas pada masa itu ialah melalui pers yang tersebar di masyarakat. Padahal dunia ideal dari lembaga pers haruslah bersifat netral dan tidak memihak elemen manapun. Kode etik jurnalistik masa Orde Baru memuat pada Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1966 mengenai penerapan hal-hal yang perlu dijadikan prinsip bagi setiap pers. Peraturan diantaranya ialah harus adanya independensi lembaga, menguji mengenai informasi yang akan diberikan ke masyarakat umum, tidak memuat berita bohong, dan tidak menyalahgunakan profesi tersebut untuk berita bohong, fitnah, dan cabul (Tebba, 2005).

Pers masa awal orde baru penuh dengan kebebasan dalam membuat informasi. Kebebasan pers dianggap sebagai mahkota dari Orde Baru. Terbukti dengan adanya perubahan *status quo* dalam Undang-undang Pers tahun 1966 mengenai prinsip dasar Pers yang menjadikan pers sebagai wadah yang tidak dapat disensor dan dikendalikan. Jika sebelumnya hanya beberapa koran saja yang boleh beredar, namun masa awal orde baru memperbolehkan semuanya untuk menulis berita sesuai dengan kaidah yang ada. Konsep framing yang akan menjadi landasan penelitian ini ialah konsep framing oleh Entman. Dalam konsep ini, terdapat dua hal dalam framing yang sangat berkaitan erat yaitu proses seleksi dan menonjolkan aspek dari realita (Eriyanto.2002). Penekanan ini akan menggambarkan koran tersebut dalam melakukan pembingkaiian terhadap legitimasi atau delegitimasi aktor. Bentuk penonjolan sangat beragam, biasanya menempatkan satu aspek informasi lebih menonjol daripada informasi lain dengan menempatkan di headline depan atau belakang, grafis yang mencolok agar menarik pembaca, dan generalisasi agar masyarakat menyatukan persepsi (Fahmi.2016). Perangkat dalam konsep framing Entman merujuk pada pemberian definisi dengan *Problem Identification*, penjelasan dengan *Causal Interpretation*, evaluasi (*moral judgement*), dan rekomendasi (*treatment recommendation*) dalam kerangka berpikirnya.

Definisi diartikan untuk mendefinisikan sebuah masalah yang diangkat. Elemen ini menjadi titik awal pembaca memahami isi berita. Ini adalah bingkai utama yang bisa menekankan framing yang akan dibahas. Penjelasan ialah memperkirakan sumber masalah atau aktor yang menjadi penyebabnya. Evaluasi

berarti membuat sebuah keputusan secara moral untuk melegitimasi atau mendelegitimasi. Biasanya akan dimasukan argumentasi wartawan yang mendukung dari framing tersebut. Dan rekomendasi menekankan pada resolusinya, seperti apa penyelesaian yang ditawarkan dan untuk mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini memiliki tujuan untuk merekonstruksi deSukarnoisasi yang dilakukan oleh pers orde baru terutama pada tahun 1966 sampai 1970. Penyusunan akan dibantu dengan ilmu komunikasi berupa framing pers dan ilmu politik dalam proses delegitimasi kekuasaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dalam bentuk deskriptif-analisis dengan mengikuti kaidah-kaidah yang sesuai dengan penelitian sejarah. Penelitian akan dibantu dengan landasan teori ilmu sosial lainnya seperti ilmu komunikasi dan ilmu politik. Berdasarkan kaidah tersebut, maka langkah penelitian ini diantaranya pemilihan topik, heuristik (pengumpulan sumber atau data), verifikasi (mengkritisi sumber secara eksternal dan internal), interpretasi (penafsiran atas sumber yang dianggap layak), dan historiografi (penulisan sejarah).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proliferasi Figur Soeharto sebagai Pemimpin Baru

Berakhirnya masa kepemimpinan Sukarno karena eksistensinya yang mulai pudar di masyarakat, membuat muncul nama baru sebagai gantinya. Peristiwa Gerakan 30 September menjadi gejolak politik yang mengakibatkan orang-orang dibelakang Sukarno mulai memutar Haluan (Humaidi.2018). Ditambah dengan Sukarno yang terus mengarah pada tendensi membela gerakan tersebut. Dilansir pada Koran Pikiran Rakyat pada 7 Oktober 1965 yang menjelaskan bahwa Gerakan tersebut hanyalah sebuah riak dalam gelombang samudera revolusi. Argumentasi tersebut melogikakan bahwa peristiwa tersebut tidak begitu berarti bagi revolusi yang tengah berjalan. Sehingga makna tersiratnya ditafsirkan bahwa Sukarno membela Gerakan 30 September itu.

Koran harian menyambut dengan damai kedatangan sosok baru bagi pemerintahan yaitu Jendral Soeharto. Kewibawaannya di bidang militer membuat persepsi masyarakat percaya bahwa beliau adalah sosok yang tegas dan berani dalam menumpas keburukan yang tengah terjadi. Pemberitaan ini dimulai pada Koran Berita Yudha tahun 1966 menyoroti kehadiran sosok Soeharto. Pada tanggal 28 Juni 1966 dengan judul “Surat Perintah 11 Maret : Lontjeng Kematian Orde Lama dan Mempersilakan Demokrasi kembali mengambil tempatnja yang terhormat di negeri kita” berisi Anggota MPRS menginginkan terbentuknya kabinet baru yang mampu menjalankan politik dalam negeri secara jujur dan disegani. Surat perintah 11 Maret menjadi landasan objektif karena orde lama telah kehilangan kebebasannya. Sehingga selesainya orde lama, maka demokrasi akan kembali kepada rakyat.

Seminggu setelahnya pada tanggal 5 Juli 1966 muncul kembali berita dengan judul yang membandingkan Sukarno dengan Soeharto yaitu “Tepat sekali kalau Presiden tugaskan Letdjen Soeharto bentuk Kabinet Ampera”. Berita tersebut memuat isi Kabinet Ampera sebagai langkah menanggulangi tuntutan rakyat yang sudah tidak percaya terhadap Presiden Soekarno dalam menangani stabilitas politik dan ekonomi. Hal ini bisa membantu Soeharto dalam sukses di Pemilihan Umum. Berita tersebut berhasil menarasikan bahwa Soeharto sedang memproliferasi nama dan kebijakannya bagi masyarakat. Konsolidasi yang dilakukan Soeharto untuk menyebarkan legitimasinya diterima oleh seluruh masyarakat. TNI-AD yang saat itu dibawah pimpinan Jenderal Soeharto secara perlahan menerima pengalihan kekuasaan ini dan berusaha menata kembali masyarakat Indonesia. Ada tiga pilar utama dari proliferasi Soeharto dan kebijakannya yaitu menopang kekuatan birokrat, teknokrat, dan tentara (Milne.1984).

Sukarno, G30S dan PKI

Koran Berita Yudha menjadi koran paling awal yang selalu memberitakan keterlibatan Sukarno dengan kasus pemberontakan 30 September. Pada 14 Mei 1966 koran ini memberitakan hal tersebut dengan judul “Pertahankan Perintah 11 Maret sampai pem umum” yang mengungkapkan Pentingnya Surat 11 Maret yang perlu dipertahankan hingga pemilihan umum. Karena Bung Karno telah mengalami

konflik bagi progresif revolusioner Indonesia yang menginginkan persatuan dan menegakkan pancasila bukan membela pemberontakan yaitu PKI. Seminggu setelahnya pada tanggal 25 Mei 1966 masih terus memberitakan Surat Perintah 11 Maret dengan judul “Perintah 11 Maret merupakan sendjata jg ampuh” dengan isi Surat perintah 11 Maret masih disambut positif oleh masyarakat karena Soeharto melakukan tindakan yang tepat. Sehingga secara psikologis masyarakat lebih menerima kinerjanya dan menjadi landasan hukum yang ampuh untuk dipertahankan.

Berita mengenai keterlibatan Sukarno berlanjut pada tanggal 23 Juni 1966 dengan judul “Rakjat dan Bung Karno telah masuk perangkap PKI” yang berisikan Sidang MPRS menyetujui Tritura untuk menghancurkan mental PKI. Dikatakan pula bahwa rakyat dan Bung Karno telah masuk kedalam perangkap PKI. Beberapa anggota juga menentang adanya Presiden seumur hidup. Selama satu setengah tahun telah diberitakan 3 informasi yang memframing adanya keterkaitan Sukarno dengan PKI. Dalam pemberitaan tersebut artinya pemingkalan yang dicapai ialah menginfokan kepada pembaca bahwa Surat Perintah 11 Maret merupakan solusi terbaik karena Presiden Sukarno telah gagal dalam merespon kasus tersebut. Berita juga diletakkan pada lembar pertama sehingga menjadi sorotan cepat bagi pembaca. Dengan judul yang cukup meyakinkan pembaca bahwa Presiden Sukarno terperangkap dalam permainan PKI sehingga Surat Perintah yang memandatkan orang lain yaitu Soeharto menjadi solusi paling terbaik bagi masyarakat.

Koran berikutnya yang memberitakan keterkaitan Sukarno dengan Peristiwa 30 September adalah Koran Sinar Harapan. Berita pertama muncul pada tanggal 21 Februari 1967 dengan judul “Penjелеwengan Konstitusionil B. K. Merangsang & Beri Peluang” yang berisi Persiapan-Persiapan Gestapu/PKI Presiden terutama sebagai panglima ABRI sedikitpun tidak membantu menyelesaikan keadaan dengan mengambil tindakan-tindakan yang tegas dan positif, seharusnya paling tidak mengutuk G30S/PKI. Dua hari kemudian, berita muncul lagi pada tanggal 23 Februari 1967 berjudul “Pres Soekarno Serahkan Kekuasaan Pemerintahan” yang berisi Presiden Soekarno yang sudah sejak Agustus 1945 menjadi Presiden RI, diumumkan telah menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Jenderal Soeharto

selaku pengemban SP 11 Maret. Pengumuman tentang penyerahan kekuasaan eksekutif yang sudah sejak beberapa hari ditunggu-tunggu dalam bayangan konflik situasi yang semakin sengit, dilakukan oleh Menpan B. M. Diah.

Beberapa bulan kemudian, pada tanggal 5 Agustus 1967 memuat kembali dengan tema yang sama berjudul “Tanpa Idjin Pangdam VI/Siliwangi Dr. Ir. Soekarno Dilarang Keluar Wilayah Hukum Djabar” berisi Pangdam VI/Siliwangi, Mayjen HR. Dharsono telah mengeluarkan Keputusan No. 01/5/Slw/Kopkam/67 pada 3 Agustus 1967 yang isinya melangang Soekarno meninggalkan atau bepergian keluar wilayah hukum Kodam VI/Siliwangi tanpa izin tertulis Pangdam VI/Siliwangi selaku Pelaksana Khusus Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Penertiban Kodam VI/Siliwangi. Kemudian berlanjut di tanggal 18 Agustus 1967 dengan judul “17 Agustus Jang Pertama Dalam Zaman Post – Sukarno” memuat isi Zaman post-Soekarno lahir setelah akibat dari gagalnya pemberontakan G30S/PKI, usaha-usaha selama lebih dari satu tahun agar Bung Karno menghukum G30S/PKI tetap ditolakny.

Kemudian, di tahun 1968 tetap konsisten untuk memberitakan dengan tema yang sama, diantaranya seperti pada tanggal 28 September 1968 dengan judul “Keputusan Grasi Masih Di Pertimbangkan Preisden Soekarno sedang Di Interogasi Salah-Tidaknja Belum Disimpulkan” yang berisi Interogasi Bung Karno sesuai dengan keputusan MPRS. Hal-hal yang berkaitan dengan PKI juga dilarang beraktivitas. Presiden Sukarno masih belum jelas statusnya apakah bersalah atau tidak. Disusul tiga hari setelahnya pada 1 Oktober 1968 berjudul “Lubang Buaja Mengenangkan Kita Pada Kekedjaman PKI” yang berisi Presiden Suharto mengikuti upacara hari kesaktian pancasila. Setelah upacara tersebut ada penganangan terhadap pahlawan revolusi. Penumpasan terus dilaksanakan oleh RPKAD dengan diberikannya surat perintah 11 Maret yang memandatkan Presiden Suharto menggantikan Presiden Sukarno sepenuhnya. Lusanya, kembali menerbitkan pada 3 Oktober 1968 dengan judul yang lebih eksplisit yaitu “Permintaan Grasi Ditolak, 5 Gembong GESTAPU/PKI TETAP AKAN DIHUKUM MATI” dengan isi Telah diumumkan oleh Presiden Soeharto bahwa tidak ada grasi terhadap Gestapu/PKI sehingga mereka akan tetap dihukum mati.

Mereka yang dihukum ialah yang terlibat dan berambisi untuk menjadi golongan yang terlibat.

Berbeda dengan Koran Gelora Indonesia, yang memberitakan Sukarno dalam 1 lembar penuh di halaman pertama. Tulisan yang besar dan tebal pada 13 Maret 1967 berjudul “2 Kesalahan Besar Bung Karno Sbg Kep. Neg.” berita tersebut memuat ungkapan Letjen A.J. Mokoginta yang mengatakan setidaknya ada dua sebab kesalahan besar:

Bung Karno terlalu yakin dapat mem-Pancasila-kan PKI

Sudah lama Bung Karno tidak lagi menjadi penyambung lidah rakyat

Isi berita tersebut langsung dibuat point sehingga memudahkan pembaca dalam memahaminya. Dilihat dari bahasanya, sudah cukup meyakinkan bahwa Sukarno terlalu berambisi terhadap PKI yang padahal menjadi kesalahan terbesarnya karena berlawanan dengan Pancasila.

Dalam koran Kompas juga memuat pemberitaan yang juga demikian. Koran Kompas dikenal sebagai koran yang memiliki penulisan yang kritis terhadap status quo ternyata juga menempatkan beberapa berita mengenai Sukarno dengan G 30 S/PKI di bagian awal lembaran. Pada tahun 1968, setidaknya ada lima berita yang diluncurkan secara harian. Berita tersebut diantaranya ada pada tanggal 13 Agustus 1968 dengan judul “Sisa2 G30S/PKI Gunakan Pertentangan Antar Kita Sebagai Peluang” memuat Presiden Suharto dalam Sidang Kabinet Pembangunan menyampaikan bahwa sisa-sisa G30S PKI membawa pertentangan antara kaum orpol dan ormas. Sehingga, segala media dihimbau untuk membersihkan seluruh yang berkaitan dengan PKI.

Proses framing yang dimuat oleh keempat koran, memiliki satu pola berita yang menonjol dan merekonstruksi realitas dampak Gerakan 30 September (Intan.dkk, 2021). Sesuai dengan teori analisis framing oleh Entman, pemberitaan tersebut mengacu pada 4 elemen yang sama. Pertama, dari definisi pemberitaan secara eksplisit menjelaskan bahwa dari kasus tersebut memiliki dampak yang buruk bagi karier politik Sukarno. Beberapa berita juga langsung mengarahkan narasinya kepada hukuman yang seharusnya diterima oleh Sukarno. Kedua, penjelasan atau Casual Interpretation juga menjelaskan secara sistematis apa alasan

Sukarno terkena dampak dari kasus tersebut. Karena adanya kedekatan dengan beberapa oknum PKI, kurang tegasnya Sukarno dalam merespon kasus tersebut, dan adanya beberapa saksi yang menyatakan bahwa memang Sukarno terlibat atau menjadi dalang dalam kasus tersebut. Ketiga, evaluasi atau moral judgement. Setiap pemberitaan mengenai Sukarno dengan Pemberontakan 30 September, selalu meresolusikan untuk beliau segera diinterogasi bahkan diusut sebagai terdakwa. Keempat, rekomendasi atau treatment recommendation. Karena penyelesaiannya ialah menginginkan dipertahankannya Surat Perintah 11 Maret untuk mewujudkan stabilitas politik Indonesia kedepannya karena sudah tidak ada laginya kepercayaan rakyat terhadap Sukarno.

Sukarno Presiden Gagal

Proses de-Sukarnoisasi tidak hanya terjadi pada nama Sukarno, namun juga mengintegrasikan rezim serta kebijakannya. Sehingga selama menjabat beliau terkesan gagal dalam figurnya menjadi sosok presiden yang ideal. Hal-hal yang pernah dibuat pada masa rezim Sukarno dan kebijakan yang diterapkan mulai didekonstruksi guna menjadikan Orde Baru sebagai rezim baru yang bisa masuk kepada lapisan masyarakat.

Kegagalan sosok presiden Sukarno membuat koran harian melakukan beberapa kritik terhadap kebijakan yang sudah dijalankan. Usaha rekonstruksi membangun Indonesia dibawah kepemimpinannya, perlahan kandas didekonstruksi oleh per demi menjadikan Sukarno sebagai presiden yang gagal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dekonstruksi menurut Derrida ialah strategi untuk mengguncang dan menghancurkan konseptual awal (Sarup,2008). Artinya rezim Orde Lama dan Kebijakan Sukarno yang sudah pernah diterapkan dan diterima dimasyarakat mulai disingkirkan untuk diganti oleh rezim yang mau berkembang yaitu Orde Baru. Beberapa kebijakan yang sebenarnya sudah pernah diterima secara baik oleh masyarakat, mulai digiring oleh pemberitaan surat kabar bahwa hal tersebut tidak sepenuhnya baik bahkan harus segera diganti karena tidak sesuai dengan prinsip dan konstitusi.

Pemberitaan pada Koran Berita Yudha ditahun 1966 menyoroti paling awal terkait Orde Lama dan kebijakan yang beririsan dengan Sukarno. Dimulai pada

tanggal 28 Juni 1966 dengan judul “Surat Perintah 11 Maret : Lontjeng Kematian Orde Lama dan Mempersilakan Demokrasi kembali mengambil tempatnja yang terhormat dinegeri kita” beirisi Anggota MPRS menginginkan terbentuknya kabinet baru yang mampu menjalankan politik dalam negeri secara jujur dan disegani. Surat perintah 11 Maret menjadi landasan objektif karena orde lama telah kehilangan kebebasannya. Sehingga selesainya orde lama, maka demokrasi akan kembali kepada rakyat.

Kemudian, ada pemberitaan terkait tema tersebut pada Koran Sinar Harapan. Dimulai pada tanggal 6 Februari 1967 dengan judul “Ketua Presidium Kabinet Djenderal Soeharto: Orde Lama Belum Mau Tunduk Ketentuan-Ketentuan UUD 45” berisikan Jenderal Soeharto menegaskan bahwa rintisan perjuangan menegakkan Orde Baru belum selesai karena kekuatan-kekuatan dari pola pikiran Orde Lama belum mau tunduk terhadap jiwa, semangat, dan ketentuan-ketentuan UUD 1945 yang menjadi pegangan. Konflik antara Orba dan Orla adalah pola pikir Orba yang berusaha menegakkan UUD 45 sedangkan Orla mengingkarinya serta tidak mau melaksanakan ketetapan-ketetapan sidang umum ke IV MPRS. Dimuat kembali pada tanggal 16 Februari 1967 berjudul “Pangdam VI/Siliwangi Majdjen. H. R. Dharsono: Kita Sudah Tjukup Lama Peringatkan Orla” denga nisi Siliwangi dan masyarakat Jawa Barat siap tempur terhadap Orde Lama. Dharsono mengatakan, sebelum Siliwangi dan masyarakat Jawa Barat menyatakan siap tempur, kita sudah cukup lama memperingatkan kaum Orde Lama di bawah pimpinan Panglima Soekarno untuk melepaskan dirinya jajahan pola pikir yang munafik dan penuh kemaksiatan.

Awal bulan Maret, Koran Sinar Harapan pada tanggal 5 Maret 1967 menerbitkan berita yang langsung mengarah pada produk Orde Lama dengan judul “Projek Mertju Suar Makin Terantjam” yang berisi Federasi Ganefo yang saat di zaman Orde Lama diglorifikasi sebagai mercusuarnya gerakan olahraga dunia, kini sedang menghadapi masa kehancurannya karena kesulitan di bidang pembiayaan dan di saat yang sama negara anggota tidak mau membayar iuran anggota.

Beberapa bulan setelahnya tepat di bulan Agustus pada tanggal, 16 Agustus 1967 memuat berita dengan judul “Pidato Kenegaraan Pd. Presiden Dimuka Sidang

DPR - GR. Orde Lama Tidak Boleh Kembali Lagi” memuat isi Soeharto berpidato, "Marilah kita isi Orde Baru ini dengan menegakkan azas dan sendi Negara Hukum, azas dan sendi demokrasi. Bahwa Orde Lama tidak boleh kembali lagi dan tidak akan kembali lagi. Siapapun yang akan mengembalikan Orde Lama berarti mengingkari kemurnian cita-cita kemerdekaan. Mengingkari cita-cita 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, siapapun yang akan mengembalikan kekuasaan Orde Lama, pasti akan kita tindak dengan tegas.

Ditahun berikutnya pada tahun 1968, koran Sinar Harapan juga terus memberitakan dengan tema yang sama. Bahkan dibulan September berita terbit seminggu sekali. Pada tanggal 9 September 1968 dengan judul “INDONESIA DIMATA ASING” berisi Beberapa negara asing merasa kecewa dengan kebijakan ekonomi Indonesia yang tidak populer seperti mengurangi anggaran dan membatasi kredit. Sehingga masa orde baru dibawah Soeharto mencoba lebih radikal dengan tidak mengikuti kebijakan masa Soekarno yang dianggap sama sekali tidak jelas. Lanjut pada tanggal 14 September 1968 berjudul “Pimpinan DPRGR Protes Panglima” memuat isi Pimpinan DPRGR mengajukan protes karena telah ada pelarangan perkumpulan bagi mereka. Pelarangan ini dikeluarkan sejak 6 September 1968 dianggap sebagai ancaman demokrasi bagi perkumpulan perwakilan rakyat. Terakhir, pada tanggal 21 September 1968 berjudul “Praktek2 Orla Minta Restu Berulang Kembali” dengan isi Hingga kini masih banyak orang-orang yang meminta restu untuk kembali menerapkan praktek-praktek Orde Lama demi keuntungan pribadi. Cara-cara yang digunakan oleh orang Orde Lama akan sama dengan Sukarno yang hanya mementingkan perut. Namun, Presiden Suharto tetap membuka dialog bersama seluruh lapisan masyarakat untuk mendengarkan aspirasi mereka.

Berita tahun 1968 juga termuat pada Koran Kompas juga menyoroti Orde Lama dan kebijakannya yang sudah mulai redup dan tidak sesuai lagi dengan keadaan masyarakat Indonesia. Ada tiga pemberitaan selama setahun, diantaranya pada tanggal 10 April 1968 dengan judul “Biarkan RI tempuh djalan sendiri dalam mengatasi kesulitannja” memuat isi Para ahli politik menganjurkan kepada politikus Indonesia untuk beradaptasi dengan konsep demokrasi barat. Sesuai

dengan konsep Presiden Sukarno untuk menggunakan konsep barat dan menunda pemilu. Namun demokrasi barat akan diperbaiki karena pernah gagal diterapkan pada demokrasi liberal.

Sesuai dengan teori analisis framing oleh Entman, pemberitaan tersebut mengacu pada 4 elemen yang sama. Pertama, dari definisi yang memberitakan masalah keterkait gagalnya Orde Lama dalam menstabilkan politik dan sosial masyarakat Indonesia. Kedua, dalam penjelasannya Orde Lama buruk karena memang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan sudah mulai berlawanan dengan Pancasila. Besarnya kredit Indonesia terhadap negara asing juga mengakibatkan banyak hutang dan mengalami resesi di bidang ekonomi. Ketiga, evaluasi untuk menyelesaikan masalah tersebut ialah adanya pembentukan Kabinet Ampera. Kabinet ini dianggap sebagai kabinet baru yang dapat memenuhi harapan masyarakat. Karena fokusnya terhadap ekonomi sehingga stabilitas politik dapat diwujudkan. Keempat, rekomendasi yang diberikan ialah segera ganti kabinet Orde Lama dengan kabinet yang baru. Dan adanya pelarangan bagi seluruh aktor yang ada di Orde Lama untuk melakukan perkumpulan dengan tujuan mau mengembalikan Orde Lama di pemerintahan. Sehingga, adanya pembatasan akses bagi Orde Lama untuk balik kembali dan segera diganti dengan seluruh kebijakan dari Presiden Suharto.

Sukarno Sang Diktator dan Pribadi yang Buruk

DeSukarnoisasi dalam kehidupan pribadi Sukarno merupakan hal subordinasi yang paling jelas. Ditambah dengan munculnya narasi kediktatoran Sukarno yang membuat rezimnya terkesan kejam dan tidak mau menerima segala aspirasi masyarakatnya. Diktator juga membentuk stigma bahwa Sukarno memimpin dengan keinginannya saja tanpa mau memunculkan dialektika dimasyarakat. Alhasil narasi ini membentuk nama Sukarno buruk dimasyarakat.

Karena langsung menasar pada personal Sukarno yang terkadang tidak ada keterkaitannya dengan kinerja beliau di pemerintahan. Berita yang membuat informasi dianggap telah melakukan tendensi terhadap kepribadian Sukarno. Dalam tema ini, yang menjadi target ialah kepribadian, sifat, bahkan kehidupan pernikahan

Sukarno. Sifat yang paling tersorot ialah diktator karena sedang hangat dimasyarakat bahwa mulai banyaknya pemimpin-pemimpin yang diktator didunia. Bahkan framing koran memberitakan terus adanya pendiskreditan gagasan Sukarno serta pelarangan-pelarangan yang terjadi dimasa akhir kehidupan Sukarno (Asvi,2018).

Koran Berita Yudha menjadi koran yang paling tajam dalam memberitakan kehidupan Sukarno. Walaupun tidak banyak, namun di tahun 1966 setidaknya ada tujuh berita, diantaranya pada tanggal 1 Maret 1966 dengan judul “Orang bilang hidup Bung Karno untuk ketjap-ketjapan sadja” memuat isi Perkataan Bung Karno akan revolusi belum selesai dianggap goblok. Bahkan selama 20 tahun merdeka tidak ada perubahan yang signifikan. Banyak yang belum diselesaikan.

Dilanjut pada awal bulan April yaitu 2 April 1966 dengan judul “Suluh Indonesia dilarang terbit” memuat isi Suluh Indonesia Muda dilarang terbit mulai 28 Maret sesuai dengan arahan Surat Perintah 11 Maret. Ini merupakan cara untuk memlimitasi pemikiran Sukarno agar tidak semakin massif di masyarakat. Karena, Koran Suluh Indonesia menjadi wadah yang progresif dalam menerbitkan gagasan Sukarno. Belum ada seminggu, lima hari kemudian terbit kembali pada tanggal 7 April 1966 memuat dua berita. Pertama dengan judul “Rakjat tidak mau lagi pemimpin-pemimpin jg kerdjanja tjuma pidato-pidato sadja” memuat isi Rakyat menuntut untuk mempunyai pemimpin yang jujur dan bekerja keras. Rakyat semakin kritis sehingga sudah tidak percaya lagi dengan omongan yang seolah membela rakyat namun tidak ada gerakan. Rakyat juga menuntut untuk pemerintah hilangkan cara lama yang terlalu ribet birokrasi. Sedangkan, yang kedua tepat diposisi bawahnya memuat berita dengan judul “RADIO PEKING MENGHINA BUNG KARNO” berisi Radio resmi RRT memberikan siaran yang menghasut rakyat untuk merendahkan Presiden Sukarno.

Kemudian, pada tanggal 23 April 1966 masih terus memuat berita dengan tema yang sama berjudul “Pamflet-pamflet gelap utk lampiaskan rasa tak puas terhadap Presiden” berisi Presiden mendapatkan masalah berupa golongan yang meragukan kepemimpinannya dan menyebarkan pamflet gelap. Isi pamflet tersebut

diantaranya bahwa Presiden Sukarno sudah tua bangka tidak layak menjadi presiden seumur hidup.

Berbeda dengan Koran Sinar Harapan, berita langsung memuat yang menyinggung ide gagasannya Sukarno. Diantaranya pada tanggal 21 Februari 1967 dengan judul “Adjaran BK Bertentangan Dengan Demokrasi” memuat isi Rektor Universitas Hasanuddin, Dr. M. Natsir Said: Ajaran Bung Karno merupakan pandangan pribadi, tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak karena bertentangan dengan asas demokrasi. Dan pada tanggal 1 Oktober 1968 berjudul “Hartini dan Yurike Ingin Tjerai Dari Sukarno” memuat isi Istri kedua dan keempat Sukarno ingin meminta cerai karena jengkel dan merasa kesepian. Sehingga saat ini yang masih menjadi istri hanya Fatmawati.

Koran Gelora Indonesia juga ikut menyuarakan dengan tema yang sama pada tahun 1967. Berita ini memuat untuk memberitakan sifat Suakrno yang sudah bertendensi pada hal-hal kiri sehingga tidak sesuai dengan Pancasila. Pada tanggal 13 Maret 1967 memuat dua berita. Berita pertama dengan judul “Minta Maaf-lah Kepada Rakjat” berisi tentang Mohammad Wiwaha, atas nama Ibu Inggit mantan istri kedua Bung Karno, menyatakan bahwa sikap Bung Karno saat ini sangat disesali. Presiden Soekarno bukanlah pemimpin yang jujur, ia tidak menepati perkataannya bahwa penduduk di pegunungan akan mendapatkan listrik. Jika Soekarno adalah orang yang jujur, seharusnya Bung Karno sendiri yang meminta diadili oleh rakyat, bukan sebaliknya rakyat yang menuntut Bung Karno diadili. Dan berita kedua tepat dibawahnya dengan judul “Antara Bung Karno, Hitler, dan Stalin” memuat isi Bung Karno, selayaknya Hitler dan Stalin, muncul sebagai singa podium dan gelar Pemimpin Besar Revolusi dengan terus menggaungkan *Revolusi belum selesai.* Siapapun yang menentangnya, akan dicap sebagai kontra revolusi, antek nekolim, atau komunisto phobi.

Kedua berita tersebut memiliki pola yang sama yaitu menjelaskan sifat Sukarno. Pada berita pertama menggambarkan Sukarno yang tidak jujur, sedangkan pada berita kedua menyamakan Sukarno dengan Hitler dan Stalin yang cukup otoriter untuk membentuk sebuah revolusi.

Tahun berikutnya tahun 1968, Koran Kompas juga memberitakan hal-hal yang bersinggungan dengan kehidupan Sukarno, diantaranya ialah pada tanggal 13 April 1968 berjudul “Ir Soekarno Ingin Bebas” memuat isi Sekretaris Negara memberikan pernyataan bahwa Presiden Sukarno menuliskan surat kepada Presiden Suharto agar dibebaskan dari istana negara untuk kembali pada rumah pribadinya. Dalam surat tersebut juga beliau mengucapkan selamat kepada Presiden Suharto karena telah menjadi presiden. Kemudian pada tanggal 15 November 1968 berjudul “Persoalan Mengenai Diri Bung Karno” memuat isi Telah diadakan pembicaraan mengenai diri Bung Karno ketika meninggal akan disebut sebagai penghianat atau pejuang di negeri ini. Sehingga, para Lembaga Pertahanan Negara harus memikirkan untuk membahas hal tersebut.

Sesuai dengan teori analisis framing oleh Entman, pemberitaan tersebut mengacu pada 4 elemen yang sama. Pertama, dari definisi yang memberitakan masalah keterkait kehidupan Sukarno yang memiliki sifat buruk dan kehidupan pernikahannya yang mulai pecah. Ada juga masalah akhir hidup Sukarno yang sangat dibatasi dan jauh dari kebebasan. Kedua, penjelasan alasan mengenai masalah tersebut ialah sifat yang tidak jujur dan otoriter. Presiden Sukarno juga memiliki banyak istri sehingga tidak bisa menyenangkan seluruh istrinya. Ketiga, evaluasi dalam penyelesaian masalah tersebut ialah beredarnya narasi bahwa Sukarno memang tidak kompeten dan terlalu menggemborkan pidato saja. Bahkan, beliau harus diadili dengan sikapnya yang merugikan masyarakat seperti tidak jujur dan terlalu otoriter. Keempat, rekomendasinya bagi pribadi Sukarno ialah mulai tidak lagi adanya pengkultusan nama beliau dimasyarakat. Dan masih dipertanyakan status Sukarno bagi Indonesia apakah sebagai pejuang atau sebagai penghianat.

KESIMPULAN

Masa akhir hidup Sukarno menjadi peristiwa yang sangat pelik bagi dirinya. Tidak hanya menyerang dirinya tapi juga gagasan dan hal-hal yang berkaitan dengannya. DeSukarnoisasi merupakan proses penyingkiran nama serta gagasan Sukarno dari pikiran masyarakat. Hal ini dilakukan oleh Orde Baru serta aktor yang

terintegrasi didalamnya demi mengembangkan eksistensi politiknya. Sehingga, sebagai lawan tanding politik maka Sukarno menjadi sasaran untuk dimarjinalkan nama beserta ide-idenya yang pernah berpengaruh sangat dominan dimasyarakat.

Proses ini sangat terlihat sejak tahun 1966, ketika Suharto sudah mulai dimandatkan menjadi pemimpin untuk merespon kasus Gerakan Pemberontakan 30 September 1965. Kemunculannya dimata publik membuat adanya narasi-narasi bahwa beliau lebih layak menjadi pemimpin daripada Sukarno. Sehingga koran harian menjadi media paling pesat dalam melakukan proses deSukarnoisasi karena setidaknya memunculkan informasi yang mendominasi mengenai nama Sukarno yang problematik. Berawal dari berita itulah yang memunculkan dialektis deSukarnoisasi dan peluang meluasnya suara-suara kontradiktif dengan sosok Sukarno.

Dalam analisis penelitian ini, setidaknya, ada tiga tema dalam pola yang dimuat oleh keempat koran. Pertama, ialah dampak Gerakan 30 September terhadap Presiden Sukarno karena keterlibatannya dan kedekatannya dengan Partai Komunis Indonesia. Kedua, adanya kegagalan Sukarno sebagai presiden yang menuai dekontruksi politik Orde Lama yang tentunya berikatan erat dengan rezim yang dibangun oleh Presiden Sukarno. Ketiga, ialah kehidupan pribadi Sukarno yang buruk dan diktator.

Koran yang paling banyak menyuarakan tiga tema yang dianalisis ialah koran Sinar Harapan. Karena koran tersebut pernah dibredel pada masa rezim Sukarno sehingga mulai rutin pada saat aktif kembali setelah pembredelan. Sedangkan koran yang paling tajam dalam mengungkapkan tema deSukarnoisasi ialah Koran Berita Yudha dan Gelora Indonesia. Karena kedua koran tersebut dekat dengan aktor Orde Baru yaitu Soeharto. Keduanya juga menuai berita harian dengan cara yang sentral yaitu berada dilembar pertama dengan tulisan yang lebih tebal sehingga pembaca akan menarik untuk membaca topik tersebut secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyari, Hasyim. 2009. *Pembredelan Tempo 1994-Wajah Hukum Pers Sebagai Alat Represi Politik Negara Orde Baru*. Jakarta
- Dewi, A. R. M. (2021). Pers dan Orientasi Pemberitaan Sosial Politik Orde Baru dalam Sorotan Harian Sinar Harapan, 1966-1986. *Journal of Indonesian History*, 10(1), 24-32.
- Eriyanto. (2001). *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*. LKiS. Yogyakarta
- Eriyanto. (2012). *Analisis Framing*. Lkis. Yogyakarta
- Heryanto, Ariel. 1996. *Bahasa dan Kekuasaan : Politik Wacana di Panggung Orde Baru*. Mizan. Bandung
- Naredi, H. (2019). *PENDIDIKAN SEJARAH PERJUANGAN BANGSA (PSPB) DAN DEKONSTRUKSI SEJARAH INDONESIA PADA MASA ORDE BARU*. *HISTORIA*, 3(1), 1-10.
- Noor, I. (2011). *ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN HARIAN KOMPAS ATAS RUUK-DIY* (Doctoral dissertation, Master Program in Communication Science).
- Notosusanto, Nugroho. 1976. *Naskah Proklamasi yang Otentik dan Rumusan Pancasila yang Otentik*. Pusat Sejarah Abri
- Nugroho, Notosusanto. 1984. *Pejuang dan Prajurit*. Sinar Harapan. Jakarta
- Rusti, Amalia. (2021). *Pers Dan Pemberitaan Sosial-Politik Orde Baru Dalam Sorotan Harian Sinar Harapan 1966-1986*. *Jurnal Sejarah Indonesia Universitas Negeri Semarang*
- Sari, R. W., Winarti, M., & Darmawan, W. (2021). *Perkembangan Surat Kabar dalam Pusaran Politik: Kajian Surat Kabar Sinar Harapan 1961-1986*. *FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 10(2), 51-60.
- Siregar, Ashadi. (1995). *1966-1974 Kisah Pers Indonesia*. Lkis. Yogyakarta
- Sudibyoy, Agus. (1998). *DE-SOEKARNOSIASI DALAM WACARA RESMI ORDE BARU : Kilas Balik Praktek-Praktek Rekayasa Kebenaran dan Wacana Sejarah Oleh Rejim Orde Baru*. *Jurnal Universitas Gajah Mada*. Vol 2 No 1
- Suwirta, A. (2019). *Pers dan Kritik Sosial pada Masa Orde Baru: Kasus PEMILU 1971 dalam Pandangan Harian Kompas di Jakarta dan Harian Pikiran Rakyat di Bandung*. *SIPATAHOENAN*, 5(1), 31-52.
- Syukur, Abdul, dkk. *INDONESIA dalam ARUS SEJARAH ORDE BARU dan REFORMASI JILID VIII*. PT Ichtiar Baru Van Hoeve
- Wulan, Risca. (2021). *PERKEMBANGAN SURAT KABAR DALAM PUSARAN POLITIK: KAJIAN SURAT KABAR SINAR HARAPAN 1961-1986*. Skripsi Program Studi Pendidikan Sejarah. Universitas Pendidikan Indonesia

Zulianto, A., Atmaja, H. T., & Suharso, R. (2016). *Perkembangan Persurat Kabar Suara Merdeka di Semarang Tahun 1950-2005*. *Journal of Indonesian History*, 5(1).